

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Lembaga keuangan memiliki peranan dalam pertumbuhan dan pembangunan tatanan perekonomian suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Lembaga keuangan memiliki kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat, yakni sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada sektor-sektor riil dalam upaya pengembangan usaha masyarakat.¹

Terdapat dua jenis lembaga keuangan di Indonesia yaitu lembaga keuangan konvensional yang berbasis bunga dan lembaga keuangan syariah yang berbasis non bunga dalam memperoleh keuntungannya. Menurut Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN) Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Pengertian tersebut memiliki kejelasan bahawa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memenuhi dua kriteria yaitu kesesuaian dengan syariah islam dan legalitas operasional sebagai lembaga

¹ Desi Ardila, "Analisis Peranan Lembaga Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia" (Skripsi , Fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) ,15

keuangan.² Adapun salah satu bentuk dari lembaga keuangan syariah adalah koperasi syariah.

Menurut zulkifli, saat ini perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat terutama dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang ditandai dengan semakin bertambah dan semakin lengkapnya lembaga keuangan syariah di negeri ini, seperti adanya koperasi syariah yang juga dikenal dengan istilah *Baitul mal wa tamwil* (BMT)³.

Perkembangan lembaga keuangan syariah khususnya koperasi syariah di Indonesia dari masa ke masa berkembang dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan jumlah koperasi syariah. Pada tahun 2022, terdapat 3.912 Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang jumlahnya lebih besar dari pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2.253 Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).⁴

di dalam regulasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kebawah Nomor 11 tahun 2017 terdapat perubahan badan hukum koperasi yang awalnya BMT baitul mal wa tamwil menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran dalam mengembangkan usaha menengah kebawah. Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil berlandaskan Islam. Lembaga tersebut didirikan untuk memfasilitasi masyarakat

² Rijal Yahya, et al. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kotemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), .81-82

³ Zulkifli, Rahmawati, "Analisis Penyajian Laporan keuangan Koperasi syariah BMT al Ittihad Pekanbaru" *A-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 16 No.1 April 2019

⁴ Iwan Rudi Saktiawan " *Webinar KNEKS-IAEI: Peluang & Tantangan RUU Perkoperasian bagi Koperasi Syariah* ", diakses dari <https://kneks.go.id/berita/565/webinar-kneks-iaei-peluang-tantangan-ruu-perkoperasian-bagi-koperasi-syariah?category=1> pada tanggal 12 february2024

menengah ke bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Umum Syariah (BUS) atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) melalui kegiatan mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya⁵. KSPPS menerima titipan dana zakat, infaq, shadaqah, serta menyalurkannya sesuai peruntukannya. selain itu kehadiran KSPPS menyelamatkan masyarakat kecil yang awalnya tidak pernah tersentuh lembaga keuangan seperti Bank. KSPPS memberikan akses kemudahan dalam pendanaan tanpa membelit kehidupan.⁶

Sebagai lembaga keuangan di dalam mengelola dana nasabah, KSPPS harus mempertanggungjawabkan kegiatan operasionalnya. Adapun bentuk pertanggungjawabannya berupa laporan keuangan yang memuat posisi keuangan, kinerja dan pertanggungjawaban sosial koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Laporan keuangan memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan terkait dana yang telah dititipkannya. Dalam rangka mengatur laporan keuangan KSPPS maka dikeluarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor:91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha dan koperasi jasa keuangan syariah di dalam pasal 33 ayat 7 yang menyatakan perlakuan akuntansi menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.⁷

⁵ Huda N dan Haykal M.”. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana hlm.4

⁶ Putriningtyas, Analisis Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK 101 (Studi Pada Bmt Wanita Mandiri Boyolali) (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2019), . 1.

⁷ Keputusan menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 , .20

Perlakuan akuntansi yang menyangkut pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, yaitu mengikuti pedoman standar akuntansi keuangan syariah. Karena KSPPS merupakan koperasi dengan basis syariah maka dalam penyajian laporan keuangan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Syariah) 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

PSAK 101 mengatur penyajian secara wajar posisi keuangan, kinerja, arus kas entitas syariah, sehingga tujuan laporan keuangan tersebut tercapai. Penyajian laporan keuangan yang diatur dalam PSAK 101 terdiri dari komponen-komponen laporan keuangan yang lengkap, yaitu meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Dana Zakat, Laporan Sumber Penggunaan Dana Kebajikan, Catatan atas Laporan Keuangan⁸

Praktik akuntansi dalam hal lembaga keuangan syariah sangat penting untuk dilakukan. Dalam hal ini praktik akuntansi syariah mengambil peran seiring dengan perkembangan ekonomi syariah kearah tren yang lebih baik ditandai dengan meningkatnya aset keuangan syariah yaitu 3,39 triliun pada tahun 2022 yang mana tahun sebelumnya 2,96 triliun⁹. Laporan keuangan yang lengkap dan valid akan disajikan kepada pemakai laporan keuangan guna menghindari kebiasaan informasi yang akan diterima oleh pengguna sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Adapun komponen lengkap mengenai laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum dijelaskan secara detail di Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

⁸ Naura Nazhifah, “ Analisis Implementasi PSAK 101 Pada Laporan Keuangan Di KSSPS BMT AL-BINA Tasikmalaya” *Junal Ekonomi Syariah*.Vol.5.NO.1 Mei 2015 hlm 22

⁹ Laporan perkembangan Keuangan Syariah 2022 hlm.14

Berdasarkan hasil studi penelitian sebelumnya, peneliti menemukan bahwa penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.101 pada laporan keuangan KSPPS dan lembaga keuangan syariah lainnya masih belum maksimal. Terbukti masih ditemukannya KSPPS yang menyajikan laporan keuangan syariah yang belum sesuai dengan PSAK No. 101 yang berlaku. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya Silalahi yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT AlIttihad rumbai Pekanbaru”. Hal tersebut dikarenakan dalam laporan yang disajikan tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan selain itu BMT tersebut memiliki asset sejumlah Rp 31,498,858,147.¹⁰

Penelitian lain yang dilakukan oleh Alfi yurian yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK 101 (Studi Pada Baitul Maal Wat Tamwil Masyarakat Madani, Sumatera)” menunjukkan penyajian laporan keuangan pada BMT masyarakat madani belum sesuai dengan PSAK 101. laporan keuangan BMT Masyarakat Madani belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan. laporan sumber dan penyaluran dana zakat juga laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang semestinya kedua laporan tersebutlah yang menjadi titik perbedaan antara laporan keuangan entitas syariah

¹⁰ R silalahi sanjaya” Analisis penerapan PSAK No.101 pada laporan keuangan koperai syariah BMT al Ittihad rumbai pekanbaru (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sultan Syarif kasim riau, 2012) 8

dan laporan keuangan konvensional. BMT Masyarakat madani memiliki aset Rp 1.381.506.000,00.¹¹

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat dipahami Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah yang memiliki aset yang besar tidak menjamin terhadap kepatuhan syariah. Ketidaksiharian antara laporan keuangan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan NO.101 mengingatkan KSPPS sebagai lembaga keuangan yang memiliki tanggungjawab di dalam mengelola dana nasabah. Laporan keuangan KSPPS sangat diperlukan sebagai instrument untuk melakukan pengawasan dan dasar dalam pengambilan keputusan. Mengingat bahwa laporan keuangan memiliki berbagai fungsi penting seperti menjelaskan keadaan dan kemajuan perusahaan atau lembaga serta sebagai media untuk melakukan audit dan berbagai kepentingan lainnya. Dengan berbagai kegunaan tersebut, lembaga keuangan syariah perlu membuat laporan keuangan dengan penyajian rutin, akurat, mudah dipahami, dapat dibandingkan, serta dapat diaudit.

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti memilih KSPPS Nuri Jatim sebagai objek dalam penelitian ini. KSPPS Nuri Jatim adalah salah satu KSPPS yang cukup berkembang di Provinsi Jawa Timur. KSPPS tersebut memiliki 26 kantor cabang di seluruh Provinsi Jawa Timur dan memiliki beragam prestasi salah satunya pada tahun 2019 sebagai koperasi berprestasi oleh Menteri Koperasi Dan Ukm¹². **Penelitian ini berupaya untuk menguji konsistensi temuan dari peneliti terdahulu tentang lembaga keuangan koperasi syariah yang**

¹¹ Alfi Yurian, Analisis penerapan PSAK 101 (Studi pada Baitul maal Wat tamwil Masyarakat madani, Sumatera Utara)(Skripsi, Fakultas Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara,2020) 19

¹² KSPPS Nuri Jatim “Cabang KSPPS Nuri Jatim” diakses dari <https://nurijatim.com/kantor-cabang/> pada 17 februari 2024 pukul 09.30 WIB

cenderung mengabaikan PSAK 101 dalam penyusunan laporan keuangannya dengan mengangkat penelitian yang berjudul analisis penerapan PSAK 101 pada laporan keuangan KSPPS Nuri Jatim.

B. Fokus penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul analisis penerapan PSAK 101 pada laporan keuangan KSPPS Nuri Jatim dengan fokus penelitian adalah Bagaimanakah penyajian laporan keuangan syariah di KSPPS Nuri Jatim menurut PSAK 101 ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas tujuan penelitian Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan syariah menurut PSAK 101 di KSPPS Nuri Jatim.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian merupakan kontribusi penelitian yang berkaitan manfaat praktis dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di ilmu akuntansi syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut.

1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat membantu memastikan penempatan unsur-unsur data keuangan ditempatkan pada posisi yang tepat agar data keuangan tersajikan dengan baik. Sehingga memudahkan pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan dapat mengintrepetasikan dan mengevaluasi laporan keuangan guna mengambil keputusan dengan baik. Serta dapat menambah pemahaman tentang penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 101.

2. kegunaan praktis

a. bagi KSPPS Nuri Jawa Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam penyajian laporan keuangan, menyempurnakan penyajian laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.101.

b. Bagi peneliti

Dapat menjadi sarana penerapan akuntansi khususnya pembuatan laporan keuangan berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan yang diperoleh selama kuliah dan mengetahui kondisi nyata dalam tata cara pembuatan dan penyusunan laporan keuangan.

c. Bagi pembaca atau peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya dengan menambah variabel tertentu yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan syariah.

d. Bagi dinas koperasi

Dijadikan bahan evaluasi dalam merumuskan regulasi terkait pedoman penyajian laporan keuangan syariah serta dijadikan masukan untuk memfasilitasi pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan syariah.

E. Definisi istilah

1. Analisis

Sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola. selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan

keseluruhan.¹³ Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis merupakan penguraian suatu pokok secara sistematis dalam menentukan bagian, hubungan antar bagian serta hubungannya secara menyeluruh untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat.

2. Penerapan

Penerapan adalah proses, cara perbuatan menerapkan. Arti lainnya dari penerapan adalah memperaktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁴ Adapun Unsur-unsur penerapan meliputi program, target dan pelaksanaan.

3. Psak 101

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.101 (PSAK 101) ialah standar akuntansi keuangan yang didalamnya mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan syariah.¹⁵ PSAK 101 ini merupakan pernyataan yang bertujuan untuk mengatur dasar penyajian laporan keuangan entitas syariah agar dapat

¹³ Brian Ade Rianda Bahri, 'Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.101 Revisi Tahun 2011 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah' (Skripsi, Fakultas Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel,2020) ,19

¹⁴ Wila Kartika Dewi, Analisis penerapan PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah pada bmt al hijrah bukittinggi, Skripsi, Fakultas Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau ,2020), 9

¹⁵ AI, IFAC, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah per 1 Januari*,IAI,Cetakan Pertama November 2016.

dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun laporan keuangan entitas syariah lain. Entitas syariah dalam pernyataan ini adalah entitas dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya.

4. Laporan keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan.¹⁶

F. Kajian Penelitian terdahulu

Penelitian Terdahulu Menjadi Acuan Bagi Peneliti untuk lebih memperluas teori yang akan digunakan oleh peneliti. kajian terdahulu berfungsi untuk bahan analisis berdasarkan kerangka teoritik yang dibangun dan juga sebagai pembeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. sudah ada beberapa peneliti yang meneliti mengenai analisis penerapan PSAK 101 pada koperasi syariah. berikut beberapa penelitian yang membahas mengenai analisis penerapan PSAK 101 pada laporan keuangan syariah.

Penelitian pertama, dilakukan oleh Dian Hayatul Fitri dari Universitas Islam Negeri Malang tahun 2020 dngan judul “analisis penerapan PSAK 101 pada laporan keuangan koperasi syariah murni amanah sejahterra malang” adapun hasil penelitiannya menunjukkan sebagian besar penyajian laporan keuangan koperasi syariah murni amanah sejahterra malang belum sesuai dengan PSAK 101 yang terdapat delapan komponen. Hal tersebut dikarenakan pegawai belum memahami cara penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

¹⁶ *Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), PSAK No. 101 paragraf 1

Penelitian kedua, dilakukan oleh Hafizuddin Dalimunthie dari universitas negeri mataram tahun 2022 dengan judul “ penerapan Standar Akuntansi Keuangan No 101 Syariah pada Laporan Zakat KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram” adapun hasil penelitiannya KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram menyajikan hanya dua laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi.

Penelitian ketiga, dilakukan oleh mega Diana putri dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2019 dengan judul “Analisis Penerapan Psak 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Hasanah Kota Pekanbaru)” adapun hasil penelitiannya Pada Laporan Posisi Keuangan, PT. BPRS Hasanah masih menggunakan istilah Neraca. Komponen yang digunakan masih menggunakan istilah lama seperti Aktiva, Passiva/Kewajiban, Dana Investasi Tidak Terikat dan Ekuitas. Sedangkan menurut PSAK 101 seharusnya komponen tersebut sudah berganti istilah menjadi Aset, Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas. Selain itu, Pada Laporan Sumber dan Penggunaan ZIS, PT. BPRS Hasanah tidak menggunakan istilah yang terdapat di PSAK 101, yaitu Sumber dan Penyaluran Dana Zakat. Selain itu juga, komponen yang terdapat di dalam laporan ini juga tidak sesuai dengan PSAK 101. Adapun komponennya yaitu, Sumber Dana ZIS Awal Periode, Sumber Dana ZIS, Penggunaan Dana ZIS, Total Penggunaan, Kenaikan (Penurunan) Sumber Atas Penggunaan, dan Sumber Dana ZIS Pada Akhir Periode. Adapun komponen tersebut menurut PSAK 101, yaitu Sumber Dana Zakat, Penyaluran Dana Zakat Kepada Entitas Pengelola Zakat, Kenaikan, Saldo Awal, Saldo Akhir.

Penelitian keempat, dilakukan oleh wila kartika dewi dari Universitas islam negeri Sultan sarif kasim riau tahun 2020 dengan judul “Analisis Penerapan Psak 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Bmt Al-Hijrah Bukittinggi” adapun hasil penelitiannya penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Bmt Al-Hijrah Bukittinggi belum lengkap dan rinci dikarenakan laporan posisi keuangan yang disajikan dana syirkah temporer digabungkan dengan liabilitas sehingga belum sesuai dengan format yang disajikan dalam PSAK 101 yang mengatur tentang tata cara penyajian laporan keuangan entitas syariah.

Tabel 1.1

Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dian Hayatul Fitri (2020)	Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahterra Malang	a. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif b. Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, wawancara, Dokumentasi	a) Objek penelitiannya dilakukan di lembaga. Keuangan koperasi syariah murni amanah sejahterra malang sedangkan dalam penelitian yang akan dilaksanakan di KSPPS NUTI JATIM . b) penelitian tersebut di dalam pengumpulan data dilakukan secara daring dikarenakan covid-19 sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan pengumpulan data dilakukan secara tatap muka c) Di dalam penelitian di koperasi murni amanah sejahterra

				malang menggunakan (PSAK 101) 2017 Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan (PSAK 101) 2019
2.	Hafizudin Dalimunthie (2022)	Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No 101 Syariah Pada Laporan Zakat KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram	<p>a. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif</p> <p>b. Teknik pengumpulan data menggunakan menggunakan Observasi, wawancara, Dokumentasi</p>	<p>a) Terletak pada objek penelitiannya, dimana penelitian tersebut di KSPPS gumarang akbar syariah mataram .Sedangkan objek penelitian yang akan dilaksanakan di KSPPS NURI JATIM</p> <p>b) Di dalam penelitian di KSPPS gumarang akbar syariah mataram menggunakan (PSAK 101) 2016 dan berfokus pada laporan zakat. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan (PSAK 101) 2019</p>
3.	Mega Diana Putri (2019)	Analisis Penerapan Psak 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	<p>a. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitaif</p> <p>b. Tehnik pengumpulan data menggunakan Observasi, wawancara, Dokumentasi</p> <p>c. Menggunakan (PSAK 101) 2019</p>	<p>a. Terletak pada objek penelitiannya, dimana penelitian tersebut di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Hasanah Kota Pekanbaru sedangkan penelitian ini dilakukan di KSPPS NURI JATIM</p>

		(Bprs) Hasanah Kota Pekanbaru)		
4.	Wila Kartika Dewi (2020)	Analisis Penerapan Psak 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Bmt Al-Hijrah Bukittinggi	a. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif b. Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, wawancara, Dokumentasi c. Menggunakan (PSAK 101) 2019	a) Terletak pada objek penelitiannya dimana penelitian tersebut dilakukan di Bmt Al-Hijrah Bukittinggi sedangkan penelitian ini dilakukan di KSPPS NURI JATIM